

KESIAPAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENGHADAPI GEJOLAK GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI GLOBAL

Koordinasi dan Tata Kelola Pemerintah di Tengah Dinamika Global

Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E

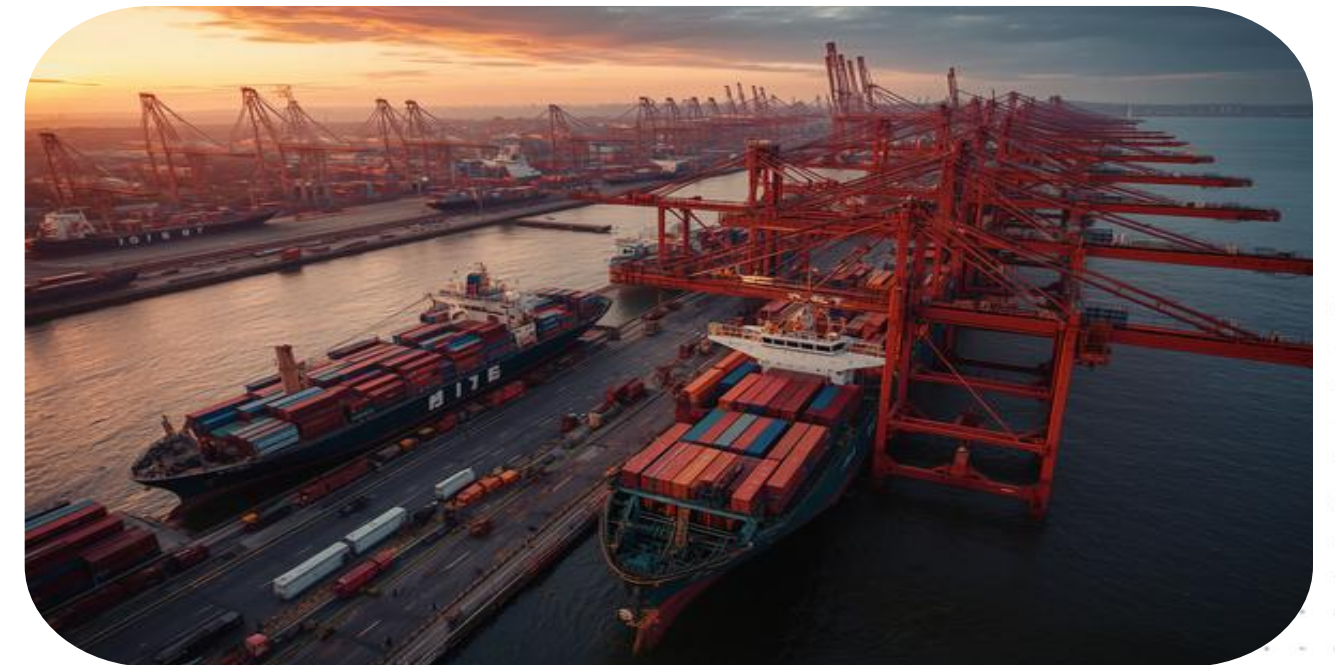
Wakil Ketua Komisi I DPR RI



KONTEKS GEJOLAK GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI GLOBAL

Lanskap Dunia yang Berubah Cepat

- Lebih dari 57% – 60% negara menghadapi ketidakstabilan geopolitik tinggi.
(WEF, dalam Global Risk Report 2026)
- Pergeseran tantangan geoekonomi global, dari dominasi barat menuju multipolaritas. Sehingga menuntut respon strategis yang adaptif.

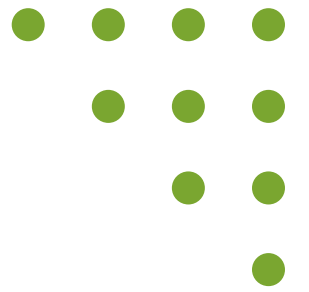
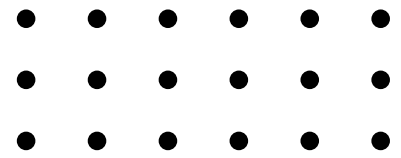


TANTANGAN BAGI INDONESIA

Dampak Gejolak Global terhadap Keamanan, Ekonomi, dan Politik Nasional

Indonesia menghadapi tekanan nyata dari dinamika geopolitik global: **ketegangan perdagangan internasional, pergeseran aliansi strategis, dan ancaman keamanan regional** yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.





PERSPEKTIF KOMISI I DPR RI

Peran dan Pandangan Komisi I dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi

Peran Komisi I DPR RI

Pertahanan negara, hubungan luar negeri, intelijen negara, serta komunikasi dan Digital menjadi bidang utama.

Prioritas Nasional

Penguatan kesiapan nasional melalui modernisasi Alutsista, diplomasi strategis, dan peningkatan kapasitas intelijen menghadapi ancaman geopolitik global.

Fungsi Legislasi

Komisi I berperan aktif dalam pengawasan kebijakan dan pembentukan legislasi responsif untuk menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi yang terus berkembang.

KESIAPAN LEMBAGA NEGARA

Kapasitas dan Tantangan Lembaga dalam Menghadapi Gejolak Global

TNI dan Polri: Pertahanan dan Keamanan

Menjaga kedaulatan wilayah dan stabilitas keamanan nasional.

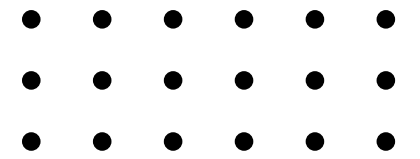
Kementerian Luar Negeri: Diplomasi Aktif

Memperkuat hubungan bilateral dan multilateral serta posisi Indonesia di forum internasional.

BIN: Intelijen Strategis

Pengumpulan dan analisis informasi strategis untuk deteksi dini ancaman geopolitik dan geoekonomi.

KOORDINASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH



Mekanisme Koordinasi

Dengan peran dari Komisi I DPR sebagai forum strategis lintas lembaga untuk memastikan data intelijen, ekonomi, luar negeri, dan pertahanan langsung diterjemahkan menjadi kebijakan terpadu.

Sinergi Eksekutif-Legislatif

Penguatan sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui fungsi pengawasan, legislasi responsif, dan pembahasan kebijakan strategis nasional secara terpadu.

Tata Kelola

Melalui transformasi birokrasi wajib dilakukan dengan menyederhanakan rantai keputusan dan menghapus sekat informasi. Poin utamanya adalah *Agile governance* yang berperan penting agar kebijakan pemerintah cepat dirasakan masyarakat.

REKOMENDASI & LANGKAH STRATEGIS

Arah Kebijakan untuk Memperkuat Kesiapan Nasional dalam Menghadapi Dinamika Global

1

Penguatan Kapasitas

Fondasinya adalah kualitas. Maka, kedepan harus mendongkrak kompetensi SDM berwawasan global, mengadopsi teknologi modern untuk *cyber warfare*, teknologi digital, termasuk *big data*, serta memperkuat postur pertahanan-intelijen.

2

Koordinasi Lintas Lembaga

Sudahi era bekerja di dalam 'ego' masing-masing. Maka, perlu adanya sistem informasi terpadu untuk berbagi data secara real-time. Sinergi eksekutif-legislatif harus diperketat agar mekanisme respons cepat kita langsung sinkron saat situasi global memanas.

3

Diplomasi dan Legislasi

Peran aktif Komisi I DPR RI dalam pengawasan yang responsif akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Di saat bersamaan, diplomasi internasional juga harus lebih agresif dan cerdas untuk mengamankan kepentingan dagang, pangan, dan energi di tengah polarisasi.

Terima Kasih



Mendorong Budaya Ilmiah Unggul di Indonesia